

Pelatihan Administrasi Pelaporan Bandes Bagi Pegawai Desa Karanganyar Kabupaten Pesawaran

(Reporting Administration Training for Bandes (Village Fund Assistance) for Village Officials of Karanganyar, Pesawaran Regency)

Hendri Hendri¹, Arman Syarif^{2*}

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Krakatau Pringsewu, Lampung, Indonesia^{1,2}

armansyarif1@gmail.com^{1,2}



Riwayat Artikel:

Diterima pada 30 Januari 2025
Revisi 1 pada 07 Februari 2025
Revisi 2 pada 13 Februari 2025
Revisi 3 pada 19 Februari 2025
Disetujui pada 22 Februari 2025

Abstract

Purpose: This study aims to improve the understanding and skills of village officials in systematically preparing administrative reports on village fund allocations (Bandes) through a participatory training program held in Karanganyar Village, Pesawaran Regency.

Methodology/approach: This study employed a qualitative descriptive approach with educational-participatory methods. The one-day training included administrative theory, interactive discussions, and practical report writing. Participants were village officials and staff, with data collected through observation, documentation, and post-training evaluation.

Results/findings: The training results showed a significant improvement in participants' understanding of administrative principles and their ability to prepare Bandes reports. There was a notable increase in the accuracy and completeness of the reports produced during the practical session. Participants also demonstrated high enthusiasm during discussions, indicating the relevance and necessity of such training for improving village governance performance.

Conclutions: This training effectively equipped village officials with essential administrative skills for managing village funds. The activity also demonstrated that participatory training approaches can successfully bridge the gap between administrative theory and practical implementation in local governance.

Limitations: This study contributes to capacity-building efforts for village apparatuses and promotes transparent and accountable village governance. The training model can be replicated in other villages with similar administrative development needs.

Contribution: The limitation of this study lies in the narrow scope of participants, which was limited to a single village, and the short duration of the training, which did not allow for long-term evaluation of its impact on field implementation.

Keywords: *Administrative Skills, Capacity Building, Local Government, Participatory Training, Public Fund Accountability, Rural Development, Village Administration.*

How to Cite: Hendri, H., Syarif, A. (2025). Pelatihan Administrasi Pelaporan Bandes Bagi Pegawai Desa Karanganyar Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 4(1), 15-23.

1. Pendahuluan

Ilmu Administrasi adalah suatu ilmu pengetahuan yang masih muda usianya dibanding dengan ilmu lainnya. Nanti pada akhir abad ke-19, ilmu ini muncul ditengah-tengah ilmu pengetahuan lainnya yang telah ada (Wagner & Raadschelders, 2025). Meskipun pengetahuan ilmu Administrasi ini baru saja berkembang, namun jauh sebelumnya sudah ada persoalan Administrasi, yakni semenjak manusia hidup disamping manusia lainnya (Jumiati & Saputra, 2019). Seperti diketahui bahwa selama hidup seseorang lebih banyak berada dalam saling pengaruhnya dengan orang lain daripada hidup menyendiri. Pada dasarnya orang tidak mampu hidup sendiri. Hampir sebagian besar kebutuhannya hanya dapat terpenuhi apabila yang bersangkutan berhubungan dengan orang lain (Hossain & Ali, 2014).

Hal ini terutama sekali disebabkan karena orang menghadapi pembatasan-pembatasan dalam usaha mencapai kebutuhannya (Fragoso, 2024). Mengenai pembatasan-pembatasan yang dihadapi orang dalam usaha memenuhi kebutuhannya, Chester L. Barnard mengemukakan sebagai berikut : Pembatasan pembatasan pencapaian Tujuan adalah akibat 2 macam faktor, yaitu :

1. Pembawaan biologis atau kemampuan seseorang.
2. faktor-faktor fisik lingkungan.

Sebagai contoh, ambillah kasus sederhana tentang sebuah batu yang terlalu besar untuk dipindahkan oleh seseorang. Ini dapat dinyatakan sebagai “batu terlalu besar bagi orang “ atau “ Orang terlalu kecil dibanding dengan batu “. Dalam pernyataan pertama kami mengatakan bahwa pembatasan terletak pada fisik lingkungan dari orang, dalam pernyataan kedua kami menyatakan bahwa pembatasan terletak pada kekuatan biologis orang, tetapi jelas pembatasan ada dalam keseluruhan situasi (Putri, Wulan, Fihartini, Ambarwati, & Pandjaitan, 2022; Valentinov & Roth, 2022). Menurut Sutarto, keterbatasan seperti itu dapat dihilangkan apabila yang memindahkan batu lebih dari seseorang. Demikian pula halnya kebutuhan seseorang yang besar dan berat, untuk dapat memenuhinya maka timbul keharusan pada orang itu bekerjasama dengan orang lain. Dengan demikian terjadilah usaha kerja sama (Syahyuti, 2012; Utama, 2023). Dari segenap proses penyelenggaraan usaha kerja sama manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau tujuannya, telah umum dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan dengan suatu istilah “ Administrasi “. Sudah pasti bahwa usaha kerja sama manusia seperti yang telah dikemukakan diatas telah ada sejak zaman dahulu kala misalnya, kerja sama manusia membangun Taman tergantung di Babilonia, Piramid di Mesir, Tembok Raksasa di Cina, Candi Borobudur di Indonesia dan lain-lain. Jadi Administrasi itu telah ada sejak adanya sekelompok manusia di bumi ini yang bekerja bersama-sama karena dorongan oleh faktor keinginan maupun faktor keharusan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan-tujuannya (Dharma, Agustina, & Windah, 2021; Marliani, 2019).

Administrasi sebagai suatu ilmu, meskipun masih muda usianya, namun karena bersifat “applied science” atau ilmu yang bersifat terapan dalam kehidupan sehari-hari, maka memungkinkan ilmu ini berkembang dengan cepat seiring dengan kemajuan zaman, kebudayaan dan teknologi (Rudy & Hidayat, 2011). Tetapi, sekalipun ilmu Administrasi bersifat terapan yang dapat mempermudah kehidupan manusia, belum tentu dengan sendirinya dapat memenuhi harapan masyarakat bila mana ilmu ini tidak aktif dikembangkan dan di bina sepanjang masa sesuai tuntutan masyarakat. Ilmu Administrasi lahir karena dibutuhkan oleh masyarakat, dan lahirnya ilmu ini tidak dengan sendirinya tetapi melalui perjuangan yang cukup lama oleh para pencintanya (Pardi, 2024; Yando, Panusunan, & Fauzan, 2023). Selanjutnya agar ilmu ini dapat berkembang sepanjang masa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ilmu ini memerlukan pembinaan dan pengembangan. Sudah pasti bahwa orang-orang yang menjadi pembina dan pengembang ilmu administrasi ini adalah orang-orang yang telah menspesialisasikan dirinya dalam bidang ilmu administrasi, berikut orang-orang yang membutuhkannya atau masyarakat pada umumnya (Fauzan, 2017; Mardiono, Nanra, & Rican, 2023). Memang masih ada berbagai masalah yang dihadapi dalam mengembangkan dan membina ilmu administrasi ini, terutama di Indonesia, dimana ilmu administrasi belum lama dikenal baik pada perguruan tinggi maupun pada lembaga-lembaga pendidikan rendah, begitu pula dikalangan masyarakat umum (NEGARA, 2012). Adapun masalah-masalah yang dihadapi dalam usaha pembinaan administrasi yang perlu mendapat pemecahan antara lain :

1. Masih dijumpainya beraneka ragam arti administrasi dalam literatur, begitu pula penggunaannya dalam percakapan sehari-hari.

2. Persamaan istilah dan persesuaian paham tentang isi yang terkandung dalam suatu istilah masih menjadi persoalan pula. Misalnya istilah “Administration” dan “Management” masih sering dikacaukan oleh sebagian penulis Amerika, kedua istilah ini disamakan artinya.
3. Adanya keanekaragaman istilah terjemahan untuk sesuatu istilah asing misalnya istilah “Management” di Indonesia
4. Kedudukan Ilmu Administrasi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan tempatnya dalam ilmu pengetahuan serta cabang-cabang. Disamping masalah-masalah tersebut diatas, maka salah satu faktor yang belum memungkinkan kelancaran perkembangan ilmu administrasi di tanah air kita ini, ialah masih kurangnya ahli dalam bidang ilmu ini yang sungguh-sungguh bersedia menjadi pengembang dan pembina ilmu ini. Dewasa ini semakin terasa pentingnya peranan administrasi dalam usaha-usaha kerja sama manusia termasuk dalam usaha melancarkan pembangunan nasional.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Administrasi Secara Etimologis

Secara etimologis perkataan Indonesia “Administrasi” yang bahasa Inggrisnya “Administration”, berasal dari kata Latin, yaitu : “Ad + ministrare” dan “Administratio”. Ad + ministrare berarti melayani, membantu atau memenuhi (Rizki, 2022). Sedangkan Administratio berartipemberian bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan (Al Barqah). Jadi, Administrasi pada hakekatnya adalah usaha untuk menolong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Meutia, 2017).

2.2 Administrasi dalam Arti Sempit

Perlu dipahami bahwa istilah Administrasi di Indonesia masih sering dipakai dalam arti “Tata Usaha”. Pengertian yang demikian ini merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda dahulu, istilah Belanda “Administratie” disalin kedalam Bahasa Indonesia menjadi “Administrasi”. Administratie dalam Bahasa Belanda ini pada umumnya diartikan sebagai “Elke steisematige ordening en schriftelijke vastlegging van gegevens, samengesteld met het doel een overzicht van deze gegevens te verkrijgen in hun geheel en hun onderling verband “. (Setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain) (Sitompul, 2009). Sebenarnya pengertian administratie yang demikian baru merupakan salah satu aspek cakupan istilah administratie. Karena masih ada dua aspek lainnya yang merupakan cakupannya, yakni: “bestuur” atau manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi, dan “beheer” atau manajemen dari sumber-sumber daya seperti: finansial, personil, materiil, gudang, dan sebagainya (Fisscher, 2011). Hanya saja yang lebih populer di kalangan bangsa Indonesia sebagai pihak yang dijajah ialah pengertian administratie dari aspek tata usaha. (Atmosudirdjo, 1986) Jadi, pengertian Administratie yang dikenal luas di Indonesia ialah tata usaha. Oleh karena itu, sampai sekarang di Indonesia istilah “Administrasi” masih sering diartikan sebagai tata usaha atau pekerjaan tulis-menulis, catat-mencatat pelbagai keterangan.

Pengertian Administrasi sebagai kegiatan tulis menulis, catat-mencatat pelbagai keterangan itu dijelaskan oleh Harris Muda Nasution dalam bukunya “Kursus Pengetahuan Administrasi”, sebagai berikut : “ Dalam arti yang sempit bahkan pengertian sehari-hari, maka Administrasi artinya adalah tata usaha. Tata usaha ialah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat dan mencatat membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam organisasi Arifin Abdurachman (1971) mengemukakan pula bahwa, Administrasi dalam arti tata usaha kegiatannya meliputi penerimaan surat, penyimpanan surat, korespondensi, penduplikasian, pencatatan-pencatatan pada buku-buku atau kartothik, pokoknya segala macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan apa yang dinamakan pekerjaan kertas, bahkan yang meliputi juga pekerjaan-pekerjaan penelponan dan penerimaan tamu (Al Barqah). Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut diatas, maka dapatlah dimengerti bahwa pengertian administrasi dalam arti sempit meliputi perbuatan tulis-menulis, catat-mencatat, yang kesemuanya merupakan kegiatan penyediaan bahan keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Kegiatan-kegiatan yang demikian itu dalam bahasa Indonesia telah lazim dipergunakan istilah “Tata Usaha”.

2.3 Administrasi dalam Arti Luas

Dua istilah yang mirip tulisan dan bunyinya, namun berbeda makna dan isinya, yaitu “Administratie” (Bld) dan “Administration” (Ing), sama-sama disalin dalam satu istilah bahasa Indonesia yaitu “Administrasi”, maka istilah yang kemudian ini mempunyai dua pengertian yaitu : (1) Administrasi dalam pengertian sama dengan pengertian administratie atau yang lebih dikenal dengan kegiatan tatausaha, dan (2) Administrasi dalam pengertian sama dengan administration. Untuk pengertian yang pertama kiranya telah jelas diuraikan di atas, sedangkan pengertian yang kedua inilah yang akan di bahas pada bagian berikut (Wibowo, 2012). Administration mempunyai pengertian dan skop yang lebih luas dari pada administratie dilihat dari aspek tatausaha saja. Jadi, pengertian administrasi yang dimaksudkan di sini adalah pengertian yang lebih luas yang sekaligus mencakup tata usaha. Dalam hubungan ini, akan dikemukakan beberapa definisi dari kalangan ahli administrasi dan manajemen sebagai berikut (Nwanisobi & Christopher, 2020):

1. Dwight Waldo (1971) mengemukakan bahwa : Administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rationaliteit yang tinggi.
2. William H. Newman (1963) berpendapat bahwa : Administrasi adalah bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha dari sekelompok individu menuju pencapaian Tujuan bersama.
3. Dr. S.P. Siagian MPA (1977) berpendapat bahwa : Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai Tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Drs. The Liang Gie dan Drs. Sutarto (1977) mengemukakan pula bahwa : Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Bila diteliti secara cermat definisi-definisi tersebut diatas maka sesungguhnya Administrasi adalah rangkaian kegiatan atau proses yang :

1. Dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih).
2. Berlangsung dalam suatu bentuk kerja sama.
3. Dimaksudkan untuk mencapai Tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Ketiga faktor tersebut dapat disingkat menjadi sekelompok orang, kerja sam, tujuan tertentu. Ketiga faktor inilah yang lazim dikenal sebagai unsur mutlak dari pada Administrasi. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan (proses) yang wujudnya: merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, memimpin, mengurus, mengarahkan, membimbing, menselaraskan, mengendalikan, mengawasi, menyempurnakan dan kegiatan-kegiatan semacam itu. Untuk ringkasnya kegiatan-kegiatan semacam itu tercakup dalam suatu istilah yaitu yang disebut ”menata” atau “penataan”(Nurhapani, 2020). Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengertian Administrasi adalah rangkaian kegiatan penataan. (The Liang Gie & Sutanto,1977) Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap usaha kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dan sifat suatu kerja sama dapat bermacam-macam. Demikian juga jumlah dan susunan orang-orang yang bekerja sama dapat berbeda-beda pula. Selanjutnya usaha itu dapat pula berlangsung pada waktu dan tempat yang berlain-lainan. Tetapi pada setiap kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang pasti terdapat rangkaian kegiatan penataan yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan. Rangkaian kegiatan penataan ini sebagai suatu kebulatan kini biasanya menjadi fungsi seseorang atau beberapa orang pejabat. Atau dengan perkataan lain Administrasi sebagai fungsi dijalankan oleh setiap orang yang berkedudukan sebagai pucuk pimpinan suatu usaha kerja sama manusia atau “Ketua Organisasi”. Yang dinamakan “Administrator”. Jadi Administrator adalah kepala yang tertinggi di dalam organisasi. Tetapi tidaklah berarti bahwa Administratorlah yang satu-satunya berperan sebagai pelaksana fungsi Administrasi, melainkan dilaksanakan juga oleh pejabat-pejabat yang berada dibawahnya berdasarkan pelimpahan dari Administrator tadi (Arif & Ec, 1990). Perlu diketahui bahwa Administrasi yang merupakan rangkaian kegiatan penataan, merupakan pekerjaan penunjang pelaksanaan pekerjaan substansuif. Kelompok pekerjaan yang dilakukan dengan rangkaian kegiatan subtantif dinamakan “pekerjaan pokok” atau “pekerjaan induk” yaitu pekerjaan yang langsung bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk menegaskan perbedaan antara rangkaian kegiatan penataan dan rangkaian kegiatan substansif, Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh suatu universitas

yang bertujuan menghasilkan sarjana, maka yang termasuk rangkaian kegiatan pekerjaan substantif, antara lain meliputi kegiatan seperti :

1. Mengajarkan suatu mata kuliah
2. Menguji mahasiswa
3. Melakukan penelitian
4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat
5. Membuat skripsi
6. Mengarang Buku

Sedangkan yang termasuk rangkaian kegiatan penataan antara lain :

1. Membuat rencana kerja tahunan.
2. Membagi tugas antara pengajar.
3. Menyusun kalender akademis.
4. Menyusun jadwal perkuliahan.
5. Mengatur ujian.
6. Mengatur/mengurus tersedianya alat peraga, ruang kuliah dan lain-lain.
7. Menghimpun dan menyampaikan informasi dari pimpinan universitas kepada para pengajar.
8. Mengurus kenaikan pangkat para pengajar.
9. Berusaha menemukan cara kerja yang lebih baik.

Contoh lain ialah proses produksi yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang pabrik, rangkaian pembuatan pekerjaan substantif, misalnya :

1. Mencampurkan bahan-bahan yang diperlukan.
2. Menjalankan mesin pengolahnya.
3. Menambahkan warna yang diperlukan.
4. Memotong menjadi sesuatu bentuk dan ukuran sampai barang itu benar-benar selesai.

Sedangkan proses penataan misalnya :

1. Perbuatan-perbuatan mengatur pemakain tenaga buruh.
2. Mengurus keuangan pabrik itu.
3. Mengadakan catatan-catatan mengenai hasil produksi.
4. Memperhatikan tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap barang yang dihasilkan. The Liang Gie & Sutanto Dalam praktek, tidak ada Administrasi apabila tidak ada pekerjaan pokok atau pekerjaan induk.

Dengan demikian proses Administrasi selalu berkaitan dengan pekerja pokok. Selain daripada itu, dalam praktek akan tampak bahwa proses Administrasi dilakukan lebih awal, bersamaan dan lebih akhir dari pada pekerjaan pokok. Atau pekerjaan induk. Keadaan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

2.4 Penentuan Tujuan ADM Kegiatan Pokok Tujuan

Administrasi sebagai rangkaian kegiatan penataan di dalam pelaksanaannya bila diteliti terlihat adanya unsur-unsur yang menurut The Liang Gie unsur-unsur tersebut terdiri atas 8 macam , yaitu (Syarief & Nurhayati, 2025):

1. Organisasi: adalah unsur pertama dari Administrasi yang merupakan wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan. Dalam organisasi dikelompokkan orang-orang, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan diantara para pekerja atau unit-unit tugas.
2. Manajemen: adalah rangkaian perbuatan menggerakkan orang-orang dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama betul-betul tercapai.
3. Komunikasi: rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.
4. Kepegawaian: rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.
5. Keuangan: rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama.
6. Perbekalan: rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai kepada penyingkiran benda-benda perlengkapan dalam usaha kerjasama.

7. Tatasaha : rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama.
8. Hubungan masyarakat: rangkaian kegiatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerja sama yang bersangkutan Unsur-unsur yang disebutkan di artas terdapat dalam usaha kerja sama pada umumnya, apapun tujuan dan corak usaha kerja sama itu.

Pemisahan unsur-unsur itu hanyalah untuk kebutuhan analisis teoritis sebab dinyatakan sehari-hari unsur-unsur itu hanyalah untuk kebutuhan analisa teoritis sebab di dalam kenyataan sehari-hari kegiatan dari unsur-unsur ini saling jalin menjalin satu sama lain, karena memang administrasi adalah merupakan suatu kebulatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan(Astawa, 2024). Kiranya jelas bagi kita bahwa pengertian Administrasi yang dikemukakan kemudian ini, mencakup 8 unsur yang merupakan satu kesatuan, dimana salah satu unsurnya adalah tata usaha (rangkaian kegiatan catat mencatat, yang menyangkut keterangan), yang sering juga diistilahkan sebagai Administrasi (Nirmala & Afriansyah, 2020).

Untuk mencegah kekacauan pengertian, dan dalam rangka pengembangan dan pembinaan administrasi di Indonesia, kiranya perlu penertiban pengertian dan penggunaan istilah Administrasi ini. Untuk maksud tersebut, maka pengertian “administratie” dari bahasa Belanda yang menyangkut kegiatan catat-mencatat pelbagai keterangan, kita gunakan istilah “tata usaha”. Dan untuk pengertian “Administrasi” kita tetap persamakan dengan pengertian “Administration” (Inggris), yang didalam buku ini didefinisikan sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap usaha kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu(Silintowe & Dewi, 2020). Rangkaian kegiatan penataan yang dilakukan dalam suatu organisasi tidak berlangsung dalam keadaan lepas dari lingkungannya, sebaliknya berlangsung dengan dipengaruhi lingkungan. Faktor-faktor lingkungan ini walaupun tidak termasuk Administrasi, tetapi berpengaruh ikut menentukan apakah suatu administarasi akan berhasil mencapai tujuannya atau tidak(Kast & Rosenzweig, 1972).

Yang termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhi berlangsungnya Administrasi ini menurut F.E. Kast dan James E. Rosenzweig, antara lain :

1. Kebudayaan
2. teknologi
3. Pendidikan
4. Politik
5. Hukum
6. Kependudukan
7. Sumber fisik
8. Sosial
9. Ekonomi

Proses usaha kerja sama manusia menuju pencapaian tujuan yang mencakup segenap faktor-faktor, pengertian, unsur-unsur serta pengaruh lingkungan Administrasi menurut The Liang Gie, 1977 dapat digambarkan sebagai berikut : Rangkaian Kegiatan Penataan M K K K P T H Saat P E K E R J A A N P O K O K Penentuan Tujuan Saat Tujuan Tercapai Sekelompok Orang Tujuan Tertentu Kerja Sama Keterangan :

O : Organisasi K : Keuangan

M : Management P : Perbekalan

K : Komunikasi T : Tata Usaha

K : Kepegawaian H : Hubungan Masyarakat

3. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui metode edukatif-partisipatif. Fokus kegiatan adalah pada pelatihan peningkatan kapasitas pegawai desa dalam bidang administrasi dan pelaporan dana desa (Bandes). Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pemberian materi, sesi tanya jawab, dan praktik langsung penyusunan administrasi pelaporan.

Adapun tahapan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Registrasi peserta: Peserta melakukan pendaftaran dan verifikasi kehadiran.
2. Sambutan pembukaan: Disampaikan oleh pihak panitia dan pemangku kepentingan setempat.
3. Penyampaian materi dan tanya jawab: Materi mencakup teori administrasi, praktik tata usaha, dan sistematika pelaporan Bandes.
4. Praktik penyusunan laporan: Peserta mempraktikkan langsung penyusunan laporan administrasi berdasarkan simulasi kasus.
5. Penutupan dan evaluasi kegiatan: Dilakukan sesi ramah tamah, pengisian kuisioner kepuasan peserta, dan penyerahan modul pelatihan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 April 2020 di Desa Karanganyar, Kecamatan Pesawaran, dengan jumlah peserta terdiri dari perangkat desa dan staf administrasi. Pendekatan edukatif-partisipatif dipilih agar peserta tidak hanya memahami secara teoritis namun juga mampu menerapkan langsung dalam praktik kerja harian mereka.

4. Hasil

Hasil dari kegiatan pelatihan menunjukkan bahwa peserta, yang terdiri dari aparat desa Karanganyar, mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan administrasi pelaporan dana desa (Bandes). Hal ini teridentifikasi dari: Partisipasi aktif peserta selama sesi penyampaian materi dan diskusi. Kemampuan peserta dalam praktik langsung, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa sesuai format dan prosedur yang benar. Tingginya antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab, yang menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pemahaman administrasi secara menyeluruh. Peningkatan ketepatan dan kelengkapan isi laporan yang dihasilkan saat sesi praktik dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Pelatihan juga berhasil memperkenalkan konsep administrasi dalam arti luas—meliputi manajemen, tata usaha, keuangan, komunikasi, hingga hubungan masyarakat—yang selama ini belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar peserta.

5. Kesimpulan

Pelatihan administrasi pelaporan Bandes ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan pegawai desa, khususnya dalam hal penataan administrasi dan penyusunan laporan keuangan desa secara sistematis. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang konsep administrasi dalam arti luas dan sempit, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola desa yang lebih transparan dan akuntabel. Pelatihan ini membuktikan bahwa pendekatan langsung dan partisipatif dalam pengabdian masyarakat dapat menjadi media efektif dalam mendorong profesionalisme aparatur desa.

Kegiatan pelatihan administrasi pelaporan Bandes ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas aparat desa Karanganyar dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan desa. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga pengalaman praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan harian mereka. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan partisipatif dengan pendekatan aplikatif sangat relevan dan dibutuhkan dalam mendukung terciptanya tata kelola desa yang baik (*good village governance*), transparan, dan akuntabel. Ke depan, pelatihan semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh di desa-desa lain di Kabupaten Pesawaran.

References

- Al Barqah, F. M. Pengertian Administrasi.
- Arif, M. S., & Ec, M. (1990). Hubungan Antara Administrasi, Organisasi, dan Manajemen. *Tangerang: Universitas Terbuka*.
- Astawa, I. G. P. (2024). KONVERGENSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENGANDUNG UNSUR HUKUM PERDATA. *LITIGASI*, 25(2), 20-42. doi:<https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.17205>
- Dharma, F., Agustina, Y., & Windah, A. (2021). Penerapan Manajemen Keuangan dan Digital Marketing pada Pelaku Usaha Rengginang di Desa Kunjir. doi:<https://doi.org/10.35912/jnm.v1i1.620>
- Fauzan, H. S. (2017). Filsafat ilmu administrasi sebagai hakikat dan makna dalam keilmuan administrasi publik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 31-42.
- Fisscher, Y. (2011). *Administratie Waarneemgids 2011* (pp. 17-34): Springer.
- Fragoso, K. (2024). Poverty as capability deprivation: Considering the relational approach, group-based analysis, and socio-structural lens. *European Journal of Social Theory*, 28. doi:<http://dx.doi.org/10.1177/13684310241270471>
- Hossain, F. A., & Ali, M. K. (2014). Relation between individual and society. *Open Journal of Social Sciences*, 2(08), 130.
- Jumiati, J., & Saputra, B. (2019). *Indigeneous Public Administration: Public Administration Viewed from Local Wisdom Perspective*. Paper presented at the 1st International Conference on Social Knowledge Sciences and Education (ICSKSE 2018).
- Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1972). General systems theory: Applications for organization and management. *Academy of Management Journal*, 15(4), 447-465. doi:<https://doi.org/10.5465/255141>
- Mardiono, D. A., Nanra, S., & Rican, D. (2023). Rancang Bangun Pengaman Pintu Menggunakan RFID Dengan Mikrokontroler Atmega 328. doi:<https://doi.org/10.35912/jatra.v1i1.1872>
- Marliani, L. (2019). Sejarah Perkembangan Admnistrasi sebagai Seni dan Ilmu Pengetahuan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 252-259. doi:<https://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i4.3095>
- Meutia, I. F. (2017). Reformasi administrasi publik: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- NEGARA, B. H. A. (2012). Ilmu administrasi negara.
- Nirmala, R., & Afriansyah, H. (2020). Administrasi Tata Usaha. doi:<https://doi.org/10.31219/osf.io/vruj7>
- Nurhapani, N. (2020). Perkembangan Ilmu Administrasi Dan Fungsinya Untuk Mendukung Perkembangan Ilmu Administrasi. *Ensiklopedia Social Review*, 2(1), 9-13. doi:<https://doi.org/10.33559/esr.v2i1.415>
- Nwanisobi, B. C., & Christopher, I. C. (2020). Definition of public administration: Various scholars. *American International Journal of Business Management*, 3(9), 56-61.
- Pardi, P. (2024). Perkembangan dan Tantangan Ilmu Administrasi di Era Globalisasi. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1092-1120. doi:<https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2526>
- Putri, L. A., Wulan, M. N., Fihartini, Y., Ambarwati, D. A. S., & Pandjaitan, D. R. (2022). Pendampingan Pengembangan Pemasaran Digital Pada BUMDes Artha Jaya, Desa Yogyakarta Selatan. doi:<https://doi.org/10.35912/jnm.v2i1.1442>
- Rizki. (2022). ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ROKAN HILIR. *Administrasi Publik*.
- Rudy, E., & Hidayat, G. M. (2011). MENGENALI KEMUNGKINAN PENERAPAN POST MODERN PERSPECTIVE PADA ADMINISTRASI PUBLIK. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 8(1), 06-06. doi:<https://doi.org/10.31113/jia.v8i1.274>
- Silintowe, Y. B. R., & Dewi, Y. E. P. (2020). *Manajemen Perkantoran Modern*. Retrieved from
- Sitompul, G. (2009). ANALISIS PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG BERGERAK DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH OLEH

- BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 6(1), 85-113. doi:<https://doi.org/10.31113/jia.v6i1.348>
- Syahyuti, S. (2012). Kelemahan konsep dan pendekatan dalam pengembangan organisasi petani: Analisis kritis terhadap Permentan No. 273 Tahun 2007. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(2), 119-142. doi:<https://doi.org/10.21082/akp.v10n2.2012.119-142>
- Syarief, S. A., & Nurhayati, N. (2025). Administrasi Sekolah, Unsur-unsur Administrasi dan Bidang Garapan Administrasi Sekolah. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 268-275. doi:<https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i3.1129>
- Utama, F. R. (2023). Sosialisasi Produk-Produk Bank Syariah Sebagai Solusi Riba. *Jurnal Nusantara Mengabdikan*, 3(1), 39-46. doi:10.35912/jnm.v3i1.2664
- Valentinov, V., & Roth, S. (2022). Chester Barnard's theory of the firm: An institutionalist view. *Journal of Economic Issues*, 56(3), 707-720. doi:<https://doi.org/10.1080/00213624.2022.2079932>
- Wagner, C. S., & Raadschelders, J. C. (2025). From Disciplinary Depth to Interdisciplinary Breadth: The Case of Public Administration. *The American Review of Public Administration*, 55(4), 299-317. doi:<https://doi.org/10.1177/02750740241303106>
- Wibowo, A. T. (2012). Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara dalam Konteks Indonesia. *Universitas Indonesia: FISIP UI*.
- Yando, J. R., Panusunan, P., & Fauzan, F. (2023). Penggunaan Filler Tanah (Silt) sebagai Perencanaan Campuran Aspal Beton AC-WC. doi:<https://doi.org/10.35912/jatra.v1i1.1873>